

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TAHURA

Pada bab ini akan dibahas tentang teori dan kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Adapun materi yang akan dibahas yaitu konsep pariwisata, konsep ekowisata, konsep hutan dan konsep partisipasi.

2.1 Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal seseorang yang bersifat sementara, dengan suatu alasan selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji (Muljadi, 2010). Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan, dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pariwisata merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi. Pada awalnya, istilah pariwisata (*tourism*) muncul di masyarakat pada abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Pariwisata merupakan keseluruhan dan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan tinggalnya orang asing yang bersifat sementara dan tidak berhubungan dengan pencarian nafkah (Yoeti, 2008).

Definisi lainnya tentang pariwisata, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata menurut *World Tourism Organization (WTO)*, pariwisata adalah kegiatan seseorang yang melakukan perjalanan ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis, ataupun tujuan lainnya.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Menghapus kemiskinan.
- d. Mengatasi pengangguran.
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
- f. Memajukan kebudayaan.
- g. Memupuk rasa cita tanah air.
- h. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
- i. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Jadi kesimpulannya berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas, pariwisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dilakukan oleh seseorang atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan.

2.1.1 Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan dapat diartikan sebagai proses pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan pada masa yang akan datang. Piagam Pariwisata Berkelanjutan 1995 dalam Sunarta dan Arida (2017) menekankan bahwa pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka waktu panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika, dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan merupakan suatu konsep pengelolaan pariwisata dengan mempertahankan orisinalitas dari suatu objek wisata.

Menurut Suwena (2010:279) dalam Beramas (2019), mengkategorikan suatu kegiatan wisata dianggap berkelanjutan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Secara ekologi berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekosistem setempat.
2. Secara sosial dapat diterima, yaitu mengacu pada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan wisata) tanpa menimbulkan konflik sosial.
3. Secara kebudayaan dapat diterima, yaitu masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (kultur wisatawan).
4. Secara ekonomi menguntungkan, yaitu keuntungan yang didapat dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya. Menurut Sunarta dan Arida (2017:12), prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

1. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.

2. Keikutsertaan Para Pelaku (*Stakeholder*)

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

3. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel dan restoran seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

4. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

5. Mewadahi Tujuan-Tujuan Masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai dengan pada pemasaran.

6. Daya Dukung

Daya dukung lahan harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan.

7. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational, dan professional. Pelatihan meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, serta topik-topik lain yang relevan.

10. Promosi

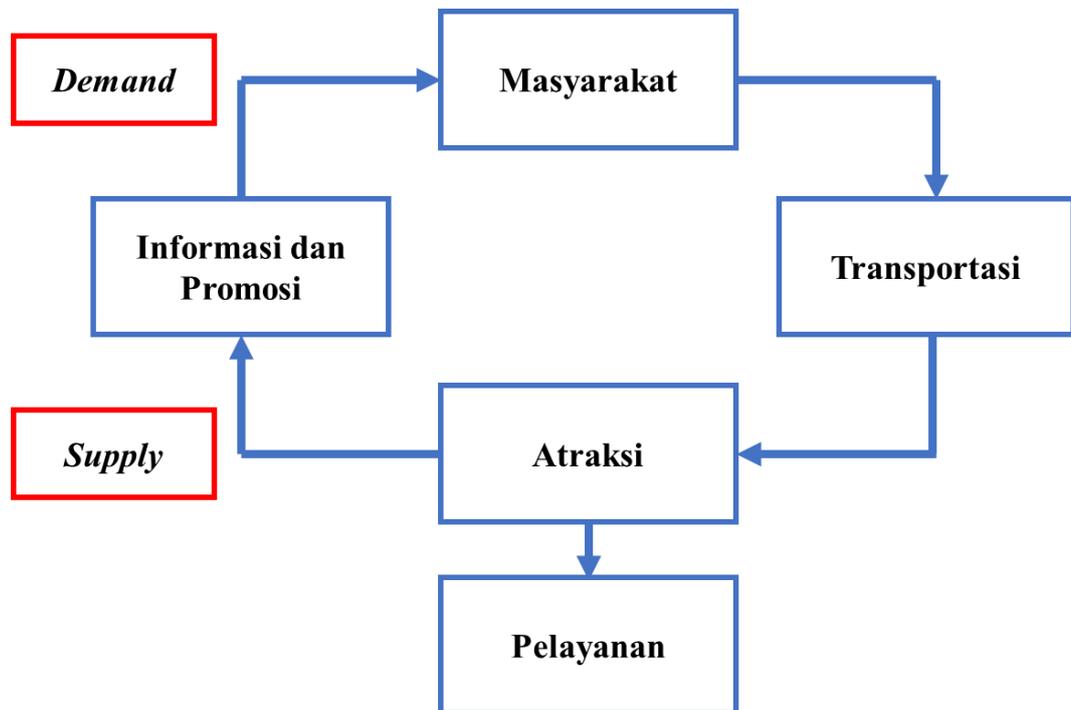
Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat.

Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini telah diterapkan di berbagai sektor pembangunan, tak terkecuali pada sektor pariwisata. Tujuan dari penerapan konsep pariwisata berkelanjutan adalah untuk memberikan dampak positif atau manfaat terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal, serta berdampak positif pada kebudayaan di wilayah tersebut. Produk dari pariwisata berkelanjutan diharapkan dapat dijalankan secara harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat, dan budaya. Masyarakat memiliki peranan sangat penting dalam konsep pariwisata berkelanjutan, sehingga masyarakat dalam konsep ini bukan sebagai objek dari suatu pembangunan melainkan menjadi subjek karena partisipasinya dalam pelaksanaannya konsep pariwisata berkelanjutan tersebut.

2.1.2 Sistem Pariwisata

Sistem pariwisata dapat dilihat lebih sederhana seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli telah mencoba membuat 'model' sistem dari fenomena yang berkembang dalam pariwisata. Menurut Gunn (1988) dalam Sunarta dan Arida (2017:11), pariwisata sebagai aktivitas ekonomi yang harus dilihat dari dua sisi yaitu sisi permintaan (*demand side*)

dan sisi penawaran (*supply side*). Komponen pariwisata pada sisi permintaan (*demand side*) adalah masyarakat atau pasar wisata yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan suatu perjalanan wisata. Sedangkan pada sisi penawaran (*supply side*) komponen pariwisata terdiri atas atraksi dan pelayanan wisata, transportasi serta informasi dan promosi wisata yang terdapat dalam suatu wilayah pariwisata. Dalam konteks pengertian tersebut memiliki arti bahwa keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah sangat tergantung kepada kemampuan perencanaan dalam mengintegrasikan kedua sisi tersebut secara berimbang ke dalam sebuah rencana pengembangan pariwisata. Menurut Gunn (1988) dalam Rahman (2014), diagram sistem fungsional pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Gunn (1988) dalam Rahman (2014)

GAMBAR 2. 1
DIAGRAM SISTEM PARIWISATA GUNN

Sedangkan menurut Metlik (1980) dalam Utama, M.A (2005), ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Attraction* (daya tarik)
Daerah Tujuan Wisata (DTW) untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya.
- b. *Accesable* (transportasi)
Accesable dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam mencapai ke tempat wisata.
- c. *Amenities* (fasilitas)
Amenities memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat tinggal dengan waktu yang lama di Daerah Tujuan Wisata (DTW)
- d. *Ancillary* (kelembagaan)
Adanya lembaga pariwisata, wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari Daerah Tujuan Wisata (DTW) apabila di daerah tersebut wisatawan sudah dapat merasakan keamanan dan terlindungi.

2.1.3 Pengembangan Pariwisata

Menurut Pitana (2005:56), pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Pengembangan pariwisata dipandang sebagai sumber daya yang potensial. Pengembangan pariwisata juga merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan. Selain itu pengembangan pariwisata akan melibatkan masyarakat sehingga banyak pihak dapat menikmati manfaatnya dan juga dapat mendorong pelestarian lingkungan alam, budaya, dan sosial masyarakat. Pengembangan pariwisata di suatu destinasi membawa perubahan pada daerah tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yaitu melalui suatu perencanaan yang matang agar sesuai dengan kondisi setempat. Namun sebaliknya, jika pelaksanaannya tidak direncanakan dengan

baik, akan menyebabkan kerugian bagi *stakeholder* maupun daerah tempat pariwisata berkembang.

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas bagi masyarakat lokal. Pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal melalui keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat setempat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan proses menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi, sempurna, dan berguna.

2.2 Ekowisata

Pada awalnya ekowisata didefinisikan sebagai suatu wisata yang menekankan pada tanggung jawab terhadap kelestarian alam, serta memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Definisi ini menekankan pada pentingnya gerakan konservasi (Ambo Tuwo, 2011). Ekowisata didefinisikan sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah-daerah alami yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat setempat serta melibatkan interpretasi dan pendidikan (*The International Ecotourism Society, 2015*). Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, ekowisata merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan seperti alam dan budaya serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Menurut Buckley (2015), ekowisata telah dipadukan dengan beberapa jenis wisata sejak tahun 1980-an, yaitu sebagai berikut :

1. *Nature-based tourism*, merupakan wisata yang menitikberatkan pada lingkungan alami. Ekowisata telah menjadi bagian penting dalam *nature-based tourism*.
2. *Cultural tourism*, merupakan wisata yang menitikberatkan pada budaya dan sejarah suatu kawasan. Di dalam *cultural tourism*, ekowisata menjadi alternatif namun sering terjadi *overlap*.

3. *Adventure tourism*, merupakan wisata yang menitikberatkan pada kegiatan yang berisiko, menantang fisik sehingga wisatawan harus memiliki kemampuan tertentu.
4. *Alternative dan mass tourism*, merupakan model wisata berskala kecil yang dimaksudkan dapat menyediakan suatu alternatif yang lebih sesuai. Wisata ini didefinisikan sebagai suatu bentuk wisata yang menekankan tanggung jawab terhadap kelestarian alam, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan dari keempat wisata ini, bentuk yang paling cocok untuk diterapkan dengan ekowisata yang memberikan efek berkelanjutan (*sustainable*) adalah bentuk *Alternative* dan *mass tourism*. *Sustainable Tourism* (Pariwisata Berkelanjutan) merupakan pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta dapat mengatasi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat (UNWTO, 2013). Berbeda dari yang biasa kita kenal, ekowisata dalam penyelenggaraannya tidak menuntut tersedianya fasilitas akomodasi yang modern. Pada dasarnya, ekowisata dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan kesederhanaan, memelihara keaslian alam dan lingkungan, memelihara keaslian seni dan budaya, adat-istiadat, menciptakan ketenangan, memelihara flora dan fauna, serta terpeliharanya lingkungan hidup sehingga terciptanya keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam sekitarnya.

Jadi kesimpulan dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas bahwa ekowisata merupakan perjalanan wisata yang berbasiskan pada alam namun tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan yang alami dan mempunyai prinsip untuk pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan kriteria dari lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.

Pengembangan ekowisata di suatu kawasan erat kaitannya dengan pengembangan objek dan daya tarik wisata alamnya (OTDWA). Berdasarkan Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) Direktorat Jenderal PHKA (2003), suatu kawasan objek wisata dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata apabila memiliki nilai potensi yang

memenuhi kriteria penilaian. Kriteria yang dipakai sebagai dasar dalam penilaian yaitu daya tarik (potensi kawasan/areal), potensi pasar, kadar hubungan, kondisi lingkungan, pengelolaan dan pelayanan, iklim, akomodasi, prasarana dan sarana penunjang, ketersediaan air bersih, hubungan dengan objek wisata lain, keamanan, daya dukung, pengaturan pengunjung, pemasaran, dan pangsa pasar. Menurut Departemen Kehutanan (2007), keseluruhan potensi ODTWA merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan.

Menurut Direktorat Jenderal Pariwisata menggariskan prinsip-prinsip pengembangan dalam ekowisata, sebagai berikut :

- a. Kegiatan ekowisata harus bersifat ramah lingkungan, secara ekonomis dapat berkelanjutan dan serasi dengan kondisi sosial dan kebudayaan Daerah Tujuan Ekowisata (DTE).
- b. Untuk menjamin konservasi alam dan keanekaragaman hayati sebagai sumber daya kepariwisataan utama, segenap upaya penting harus dilaksanakan untuk menjamin fungsi dan daya dukung lingkungan agar tetap terjaga.
- c. Kegiatan ekowisata yang secara langsung mendukung pada upaya perlindungan alam dan kelestarian keanekaragaman hayati harus di promosikan.
- d. Harus ada tindakan pencegahan untuk menghindari dan meminimalkan dampak negatif keanekaragaman hayati yang disebabkan kegiatan ekowisata.
- e. Pengembangan kegiatan ekowisata hendaknya selalu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- f. Semua yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata, termasuk pemerintah, swasta, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus bertanggung jawab secara bersama untuk mencapai ekowisata yang berkelanjutan.
- g. Konsep dan kriteria ekowisata berkelanjutan harus dikembangkan dan dikaitkan dengan program pendidikan dan pelatihan untuk pekerja dibidang pariwisata.

- h. Masyarakat harus diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai manfaat perlindungan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati melalui ekowisata.

2.3 Hutan Konservasi

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mengatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Jika berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia terdapat tiga fungsi hutan yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Diantara ketiga hutan tersebut, hutan konservasi berfungsi untuk melestarikan ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati pada kawasan tersebut seperti termuat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Hutan konservasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari : kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya.

2.4 Taman Hutan Raya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Beberapa kriteria penunjuk dan penetapan kawasan Tahura menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu :

- a. Memiliki ciri khas baik asli maupun buatan baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah.
- b. Memiliki keindahan alam dan gejala alam.
- c. Mempunyai luas yang cukup memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan satwa baik jenis asli maupun bukan asli.

2.5 Partisipasi Masyarakat

Menurut Aprelia Theresia (2014) dalam Riyani (2018), tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dapat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu :

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya kesempatan ini merupakan faktor pendorong untuk tumbuhnya kemauan yang pada akhirnya akan menentukan kemampuannya.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemauan untuk berpartisipasi ini ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat guna membangun atau memperbaiki kehidupannya.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Kesempatan yang disediakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak berarti apabila masyarakat sendiri tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Pengembangan ekowisata, hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah keikutsertaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Masyarakat lokal sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan pengembangan ekowisata. Peran dari masyarakat dalam memelihara lingkungan menjadi daya tarik utama ekowisata tidak dapat diabaikan. *Community Based Tourism* (CBT) merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. CBT memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi objek dan daya tarik ekowisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan seperti penginapan, pemandu wisata, penyediaan cinderamata khas yang berasal dari budidaya dan flora dan fauna setempat. Dengan demikian, dalam CBT peran masyarakat sebagai

pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan ekowisata. Keberhasilan pengembangan pariwisata tergantung pada penerimaan dan dukungan dari masyarakat lokal, karena masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan pariwisata dalam keseluruhan tahapan, mulai dari tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi (Wearing 2001 dalam Marysya 2017). Hal ini memiliki arti bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting seperti pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.

2.5.1 Tingkat Partisipasi

Arnstein (1969) merupakan orang yang pertama kali mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (*agency*). Partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat *citizen participation is citizen power*. Arnstein menggunakan metafora dari 8 tangga dalam partisipasi masyarakat, setiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi kekuasaan. Delapan tingkatan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut (Arnstein 1969) :

a. Manipulasi (*manipulation*)

Pada tangga partisipasi ini relatif tidak ada komunikasi dan dialog, tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik partisipan.

b. Terapi (*therapy*)

Pada tahap ini pelibatan masyarakat hanya dengan tujuan pembelajaran sehingga tidak ada tindak lanjut dari pelibatan tersebut. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.

c. Menginformasikan (*informing*)

Pada tahap ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik.

d. Konsultasi (*consultation*)

Pada tahap ini komunikasi telah bersifat dua arah, namun masih bersifat partisipasi ritual. Sudah ada penjangkaran aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan.

e. Penentruman (*placation*)

Pada tahap ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negoisasi antara masyarakat dan pemerintah, Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usul tersebut.

f. Kemitraan (*partnership*)

Pada tahap ini pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negoisasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

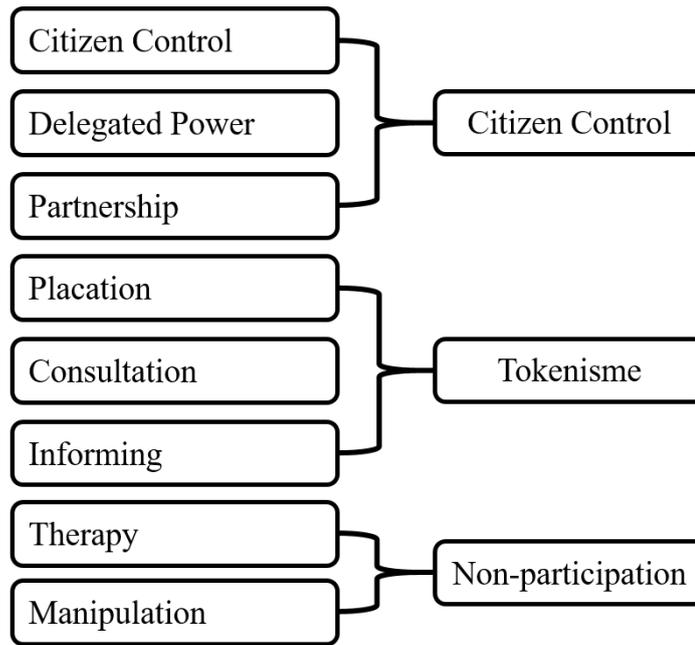
g. Pendelegasian Kekuasaan (*delegated power*)

Pada tahap ini pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.

h. Pengendalian Masyarakat (*citizen control*)

Pada tahap ini masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang telah disepakati bersama, dan tanpa campur tangan dari pemerintah.

Pada proses partisipasi yang dijelaskan di atas, sesuai dengan teori tangga partisipasi yang ditulis oleh Arnstein yang terbagi menjadi tiga tahap yang dikenal dengan *A Ladder of Citizen Participation* yaitu *Non Participation*, *Tokenisme*, dan *Degree of Cityzen*. yang ditunjukkan melalui tingkatan partisipatif sebagai berikut :



Sumber : Arnstein (1969)

GAMBAR 2. 2
TANGGA PARTISIPASI MENURUT ARNSTEIN

Sementara menurut Wilcox mengemukakan adanya lima tingkatan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut (Wilcox 1994 dalam Theresia 2014):

1. Memberikan informasi (*Information*)
2. Konsultasi (*Colsultation*)
 Pada tingkatan kedua yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetap tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan Keputusan Bersama (*Deciding Together*)
 Pada tingkatan ini memiliki arti yaitu memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan, serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak Bersama (*Acting Together*)
 Pada tingkatan ini mempunyai arti yaitu masyarakat tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

5. Memberikan Dukungan (*Supporting Independent Communit Interest*)
Pada tingkatan ini dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Sedangkan tingkatan partisipasi masyarakat yang digunakan menurut Hoblely (1996) dalam Jariyah (2014), dibagi menjadi tujuh tingkatan, yaitu:

1. Partisipasi Manipulatif (*Manipulative Participation*) adalah partisipasi dengan model keterwakilan pada suatu organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan tidak berbasis pada partisipasi individu.
2. Partisipasi Pasif (*Passive Participation*), adalah partisipasi tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat perihal apa yang telah diputuskan dan dilakukan. Masyarakat langsung menerima keputusan dan dianggap terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut.
3. Partisipasi Melalui Konsultasi (*Participation by Consultation*), adalah partisipasi melalui tanya jawab di mana melalui diskusi tersebut diharapkan akan dihasilkan identifikasi permasalahan dan aspirasi dari masyarakat. Pendefinisian permasalahan dan pengumpulan informasi dilakukan oleh orang yang profesional di bidangnya atau Pemerintah.
4. Partisipasi untuk Insentif (*Participation for Material Intcentives*), adalah partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Petani dapat menyediakan lahan dan tenaga, tetapi mereka dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model partisipasi ini adalah apabila insentif habis maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut.
5. Partisipasi Fungsional (*Functional Participation*), adalah partisipasi dilihat dari lembaga eksternal sebagai suatu tujuan akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya.
6. Partisipasi Interaktif (*Interactive Participation*), adalah partisipasi rakyat dalam analisis Bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi

dilihat sebagai suatu hak, tidak hanya berarti satu cara untuk mencapai target proyek saja, tetapi melibatkan metodologi multidisiplin dan ada proses belajar terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber daya yang digunakan, sehinggakelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada di lingkungannya.

7. Partisipasi Inisiatif (*Self-Mobilisation*), adalah partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, dan juga mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan.

2.5.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011), bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Menurut Yadav dalam Theresia (2014) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena

itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran, dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara yang telah dibangun.

Sedangkan menurut Huraerah (2008) dalam Widianti (2017), bentuk partisipasi masyarakat yaitu :

1. Partisipasi buah pikiran, dimana partisipasi diberikan seseorang atau masyarakat dalam pertemuan atau rapat dalam memberikan ide ataupun saran.
2. Partisipasi tenaga, dimana partisipasi diberikan seseorang atau masyarakat dalam suatu kegiatan guna untuk mendukung suatu pembangunan.
3. Partisipasi harta benda, dimana partisipasi seseorang atau masyarakat dalam suatu kegiatan berupa materi atau uang guna mendukung suatu pembangunan.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, dimana partisipasi seseorang atau masyarakat yang diberikan untuk mendorong terjadinya kegiatan usaha yang mandiri.
5. Partisipasi sosial, dimana partisipasi seseorang atau masyarakat yang diberikan sebagai tanda kerukunan.

Sedangkan partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff, Penstrukturan bentuk dari partisipasi masyarakat yang perlu diperhatikan adalah 3 aspek dasar yaitu bentuk partisipasi, orang yang berpartisipasi, dan cara berpartisipasi (Cohen dan Uphoff 1980). Bentuk partisipasi tersebut dibagi menjadi 4 tahap partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengambilan Keputusan (*decision making*)

Pada tahap ini bentuk partisipasi dibagi menjadi tiga bentuk yaitu bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan pada inisiasi (*inisation*), bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan pada saat pelaksanaan (*on-going*) dan terakhir adalah bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan pada operasional.

2. Implementasi (*implementation*)

Pada tahapan ini dibagi menjadi tiga bentuk yaitu bentuk partisipasi dalam kontribusi sumber daya (*resource contribution*), partisipasi dalam bentuk terlibat dalam administrasi dan koordinasi dan bentuk terakhir dalam tahap implementasi adalah kontribusi dalam program yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat (*enlistment*).

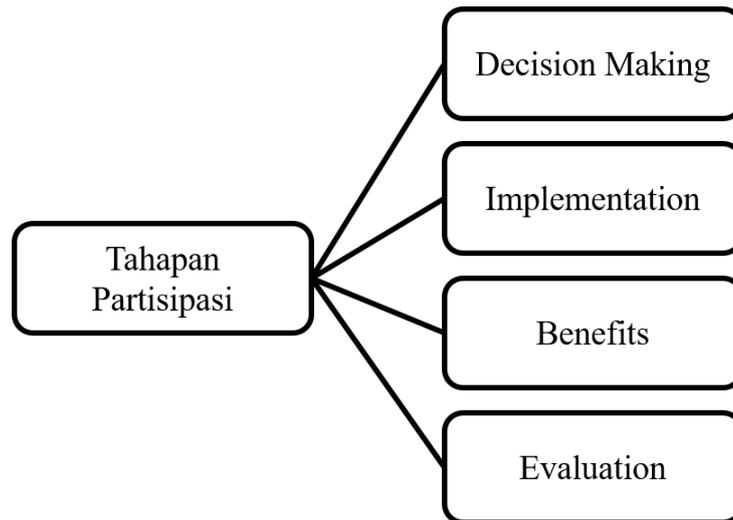
3. Keuntungan (*benefits*)

Pada tahap ini terdiri dari tiga bentuk yaitu menikmati keuntungan material (*material*), menikmati keuntungan sosial (*social*), dan yang terakhir bentuk partisipasi dengan menikmati keuntungan personal.

4. Evaluasi (*Evaluation*)

Pada tahap ini bentuk partisipasi hanya dibagi menjadi dua yaitu evaluasi secara langsung dan evaluasi secara tidak langsung.

Menurut Cohen dan Uphoff (1980), diagram bentuk partisipasi masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Cohen dan Uphoff (1980)

GAMBAR 2. 3

TAHAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MASING-MASING TAHAP

2.6 Partisipasi Masyarakat dalam Ekowisata

Masyarakat setempat atau mereka yang bertempat tinggal di sekitar daerah tujuan wisata (DTW) mempunyai peran yang amat penting dalam menunjang keberhasilan pengembangan ekowisata. Peran dari masyarakat dalam memelihara lingkungan yang menjadi daya tarik utama ekowisata tidak dapat diabaikan. Hal yang terpenting adalah upaya berbagai kegiatan wisata (Hartono 2003 dalam Nugroho 2013). Untuk itu pengelola harus dapat menghibau masyarakat agar bersedia berpartisipasi aktif secara positif di dalam pembangunan pariwisata dengan memelihara lingkungan di sekitar mereka. Agar pembangunan pariwisata dapat berkelanjutan dan efektif, serta pandangan dan harapan masyarakat setempat perlu dipertimbangkan.

Pelaksanaan ekowisata harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pemantauan kerana masyarakat lokal menjadi salah satu kunci pemain kunci dalam pariwisata. Dengan demikian, kegiatan wisata alam diharapkan mampu mengupayakan keuntungan finansial sekaligus sebagai alternatif peningkatan taraf hidup masyarakat. Masyarakat harus diperlakukan sebagai subyek pembangunan karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagai besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata.

Selain itu masyarakat lokal merupakan "pemilik" langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumberdaya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisatawan lainnya berada di tangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik mereka.

Oleh sebab itu perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka. Tidak jarang, masyarakat lokal sudah terlebih dahulu terlibat dalam pengelolaan aktivitas pariwisata sebelum ada kegiatan pengembangan dan perencanaan. Oleh sebab itu peran mereka terutama tampak dalam bentuk penyediaan akomodasi dan jasa guiding dan penyediaan tenaga kerja. Selain itu masyarakat lokal biasanya juga mempunyai tradisi dan kearifan lokal dalam pemeliharaan sumberdaya pariwisata yang tidak dimiliki oleh pelaku pariwisata lainnya (Damanik, 2006).

Sedangkan menurut Rahardjo (2005), bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal antara lain :

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, Masyarakat diajak dalam pengembangan ekowisata baik dalam keikutsertaan masyarakat dalam rapat atau penyusunan rencana suatu kegiatan. Peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif dalam menyampaikan pendapat.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, Masyarakat diajak dalam pengembangan kawasan wisata seperti mempromosikan daya Tarik wisata dan kegiatan apa saja yang terdapat dikawasan wisata.
3. Partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil, Masyarakat merasakan adanya manfaat dari pengembangan ekowisata, seperti dengan penambahan pengetahuan yang didapat selama dikawasan wisata.
4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi, Masyarakat diajak dalam mengawasi jalannya pengembangan ekowisata, peran masyarakat diharapkan aktif dalam pengembangan objek wisata.

2.6 Sintesa Literatur

Berikut ini merupakan tabel ringkasan mengenai sistesa kajian literatur dalam pembahasan analisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdul Rachman sebagai kawasan ekowisata :

TABEL II. 1
SINTESA LITERATUR PENELITIAN

Literatur	Sumber	Teori	Penyesuaian Peneliti
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata	Arnstein (1969)	<p>Delapan tingkatan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Manipulasi: Tidak adanya kehadiran masyarakat 2) Terapi: Adanya informasi namun masyarakat tidak hadir 3) Pemberitahuan: Adanya kehadiran namun diberikan hanya 1 arah. 4) Konsultasi: Adanya kehadiran dan negoisasi namun tidak di pertimbangkan. 5) Penentraman: Adanya negoisasi namun keputusan akhir tetap ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah. 6) Kemitraan: Pemerintah dan Masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam penentuan keputusan. 7) Pendelegasian: Masyarakat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah. 8) Kontrol masyarakat: Masyarakat menentukan sendiri program dan kegiatan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator. 	<p>Saat ini ekowisata merupakan alternatif pilihan wisata yang mampu menciptakan pelestarian sumberdaya alam. Mengingat konsep ekowisata adalah pelibatan masyarakat lokal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Tahura WAR menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini perlu dianalisis lebih dalam mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata</p>

Literatur	Sumber	Teori	Penyesuaian Peneliti
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata	Cohen dan Uphoff (1980)	Bentuk partisipasi tersebut dibagi menjadi 4 tahap partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Tahapan Pengambilan Keputusan (<i>Decision Making</i>) 2) Implementasi (<i>implementation</i>) 3) Keuntungan (<i>benefits</i>) 4) Evaluasi (<i>Evaluation</i>)	Dalam pengembangan ekowisata tidak hanya mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, melain perlu mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pengembangan pariwisata. Hal ini perlu dianalisis lebih dalam mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata
	Rahardjo (2005)	Bentuk keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata, antara lain : 1) Tahap perencanaan 2) Tahap pelaksanaan 3) Tahap menikmati hasil 4) Tahap evaluasi	

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dari sintesis literatur yang telah diuraikan diatas, maka disusunlah sasaran dan indikator penelitian sebagai arahan terkait data penelitian di lapangan. Adapun sasaran dan indikator penelitian terlihat pada table berikut :

TABEL II. 2
SASARAN DAN VARIABEL PENELITIAN

No	Sasaran	Variabel	Keterangan
1	Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata	- Manipulasi	Masyarakat tidak mengetahui informasi dari pelaksanaan kegiatan
		- Terapi	Masyarakat mengetahui adanya informasi pelaksanaan kegiatan
		- Pemberitahuan	Masyarakat menghadiri sosialisasi, tanpa memberikan usulan/pendapat hanya mendengarkan dari satu pihak
		- Konsultasi	Masyarakat memberikan pendapat/usulan
		- Penentraman	Pendapat/usulan dari masyarakat diterima oleh pihak pelaksana kegiatan, tetapi usulan tersebut

No	Sasaran	Variabel	Keterangan
			tetap dinilai kelayakannya oleh satu pihak
		- Kemitraan	Masyarakat dan pihak pelaksana kegiatan secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam pembangunan yang telah direncanakan
		- Pendelegasian	Masyarakat diberikan kewenangan dalam mengawasi hasil dari pembangunan
		- Kontrol Masyarakat	Masyarakat diberikan tanggung jawab sepenuhnya dalam melakukan mengevaluasi hasil dari pembangunan
2	Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata	- Tahapan Perencanaan atau Pengambilan Keputusan	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan khususnya dalam perencanaan program pembangunan dapat dilihat melalui : 1) keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) keaktifan masyarakat dalam rapat atau musyawarah, 3) keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan, 4) keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
		- Implementasi atau Tahap Perencanaan	Partisipasi dalam pembangunan meliputi 1) partisipasi dalam kontribusi ,2) partisipasi dalam administrasi dan koordinasi, dan 3) partisipasi dalam program yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat, 4) partisipasi dalam mempromosikan daya tarik wisata
		- Keuntungan	Partisipasi dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dapat dibedakan menjadi, 1) menikmati keuntungan material, 2) menikmati keuntungan sosial, 3) menikmati keuntungan personal seperti penambahan pengetahuan yang didapat selama dikawasan wisata.
		- Evaluasi	Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan wisata.

Sumber : Hasil Analisis, 2019